




PENGADILAN NEGERI SEKAYU

Jl. Merdeka, No.485, Telp. (0714) 321020,
Fax. (0714) 321281

Email : pengadilannegeri.sekayu@yahoo.co.id
Website: www.pn-sekayu.go.id

NOMOR SOP	85/W6-U7/ /HK/SOP/2026
TGL. PEMBUATAN	: 02 Januari 2026
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 02 Januari 2026
DISAHKAN OLEH	 KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU SILVI ARIANI, S.H., M.H. NIP. 197609292001122006
NAMA SOP	SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
4. Buku II Mari tentang Pelaksanaan Tugas dan administrasi peradilan
5. Perma 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintah
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3239/DJU/SK/HM02.3/II/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilum Nomor 77/DJU/SK /HM02.3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1
2. D3
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP PTSP

Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Nomor Antrian

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak terlaksana dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku Tamu Elektronik

Diagram Alir Penanganan Sengketa Informasi Publik

No.	Uraian Prosedur	Diagram Alir Penanganan Sengketa Informasi Publik							
		Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Bidang Fasilitasi Sengketa	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengirimkan permohonan penyelesaian sengketa				START	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi	1 hari kerja	Permohonan penyelesaian sengketa	
2	Menganalisis sengketa dalam upaya penyelesaian bersama Bidang Fasilitasi Sengketa			[]		Surat permohonan penyelesaian sengketa	1 hari kerja	Hasil analisis penyelesaian sengketa	
3	Melaksanakan mediasi sengketa informasi	[]	[]			Berita acara penyelesaian sengketa	Maksimal 10 hari kerja	Hasil penyelesaian sengketa	
4	Menerima putusan mediasi sengketa informasi	{ } ya	Putus			Hasil mediasi	1 hari kerja	Putusan hasil mediasi	
5	Apabila tidak setuju, maka dilanjutkan ke tahap adjudikasi	tidak			[]	Putusan hasil mediasi	1 hari kerja	Pelaksanaan adjudikasi/persidangan	